

ABSTRAK

Salah satu perbuatan hukum tersebut yakni terkait usaha perparkiran yang diikat oleh adanya suatu perjanjian antara pengelola badan usaha perparkiran dengan pengguna perparkiran sebagai konsumen. Penggunaan perjanjian baku khususnya di dunia bisnis parkir lazim di antara klausul-klausul dinilai sebagai klausul yang memberatkan dan banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku adalah yang disebut *klausul eksonerasi*. Permasalahannya; 1. Bagaimana kedudukan penerapan klausul eksonerasi dalam perjanjian jasa parkir ? dan 2. Bagaimana akibat hukum penerapan klausul eksonerasi terhadap pengelola parkir atas hilangnya kendaraan yang di parkir ? Metode penelitiannya melalui pendekatan penelitian yuridis normatif. Kerangka teori yang dipergunakan Teori Keadilan dan Perlindungan Hukum. Hasil penelitiannya; Kedudukan penerapan klausul eksonerasi dalam perjanjian jasa parkir, hukum perjanjian baku berklausula eksenorasi dalam perjanjian penitipan parkir, baik dilihat dari KUHPerdata maupun Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK, adalah tidak memenuhi syarat-syarat hukum. Karena ada beberapa ketentuan yang dilanggar, yaitu ketentuan Pasal 1320, 1335, 1337, 1338 dan 1339 KUHPerdata, Pasal 18 UUPK, dimana pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tidak dilarang sepanjang tidak menyalahi aturan pencantuman klausula baku. Perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi dalam perjanjian jasa parkir, merupakan perjanjian yang isinya sudah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir/karcis parkir, dimana saat terjadinya perjanjian tidak ada proses tawar menawar dari para pihak. Secara substansial, perjanjian tersebut tidak ada kesetaraan, keseimbangan dan perlakuan yang adil diantara pelaku usaha dan konsumen. Dalam suatu perjanjian prinsip keadilan seharusnya dapat ditemukan dalam setiap peraturan perundang-undangan. Konsep keadilan seharusnya mendapat posisi utama. Akibat hukum penerapan klausul eksonerasi terhadap pengelola parkir atas hilangnya kendaraan yang di parkir, dalam kontek hukum transaksi antara pelaku usaha dan konsumen mempunyai hubungan hukum timbal balik, dalam kaitannya untuk mewujudkan hak dan kewajiban para pihak, dimana kewajiban berada disisi konsumen sedangkan hak berada disisinya produsen. Jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya, maka pelaku usaha dapat dituntut secara hukum untuk mengganti segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. Mengingat adanya dugaan kelalaian dari penyedia jasa parkir, sehingga mengakibatkan hilangnya mobil pengguna jasa parkir, maka upaya hukum dari pengguna parkir dilakukan melalui peradilan dengan gugatan pengguna yang ditujukan kepada penyedia jasa parkir. Di sarankan dalam rangka untuk menertibkan konsep perjanjian baku yang memasukkan klausula exonerasi, maka perlu adanya pengawasan serta pembinaan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha yang potensial melakukan perbuatan hukum dengan konsep penerapan perjanjian baku.

Kata Kunci: Akibat Hukum Klausula Eksonerasi, Pengelola Parkir

ABSTRAC

One of the legal actions in question is related to parking business operations, which are bound by an agreement between the parking business operator and the parking users as consumers. The use of standard agreements, Particularly in the parking business, is common. Among the clauses that are often considered burdensome and frequently appear in standard agreements are those referred to as exoneration clauses. The issues are: 1. What is the legal standing of the application of exoneration clauses in parking service agreements? 2. What are the legal consequences of applying exoneration clauses to parking operators for the loss of parked vehicles? The research methodology employs a normative juridical approach. The theoretical framework used is the Theory of Justice and Legal Protection. The findings are as follows: The legal standing of the application of exoneration clauses in parking service agreements, specifically in standard agreements containing exoneration clauses in parking deposit contracts, whether viewed from the Civil Code (KUHPerdata) or Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK), does not fulfill the legal requirements. This is because several provisions are violated, namely Articles 1320, 1335, 1337, 1338, and 1339 of the Civil Code, as well as Article 18 of the Consumer Protection Law. The inclusion of exoneration clauses in standard agreements is not prohibited as long as it does not contravene the rules governing the inclusion of standard clauses.

Standard agreements that contain exoneration clauses in parking service agreements are agreements whose terms have been standardized and are expressed in the form of parking tickets or forms, where no bargaining process occurs between the parties at the time the agreement is made. Substantially, such agreements lack equality, balance, and fair treatment between business actors and consumers. In an agreement, the principle of justice should be reflected in every regulation. The concept of justice should hold a primary position.

The legal consequences of applying exoneration clauses to parking operators for the loss of parked vehicles lie in the legal relationship between business actors and consumers, which is reciprocal in terms of fulfilling the rights and obligations of the parties. Obligations lie with the consumer, while rights lie with the producer. If the business actor fails to fulfill their obligations, they can be legally held accountable to compensate for any losses arising from such failure.

Given the alleged negligence of parking service providers resulting in the loss of a consumer's vehicle, legal action can be taken by the parking user through litigation, filing a claim against the parking service provider. It is recommended that, to regulate the concept of standard agreements incorporating exoneration clauses, there should be oversight and guidance by the government for business actors who may potentially commit legal violations through the application of standard agreements.

Keywords: Legal Consequences of Exoneration Clauses, Parking Operators